

Evaluasi Kualitas Pelayanan Halte SMPN 5 Karawang di Kabupaten Karawang

Ekthy Putri Anggraini^{1*}, Hasna Nurhanifah^{2*}, Riyan Suganda^{3*},
R. Caesario Boing RR^{4*}

^{1*} Sarjana Terapan Transportasi Darat, Politeknik Transportasi Darat Indonesia - STTD, Kota Bekasi, Indonesia

^{2*} Sarjana Terapan Transportasi Darat, Politeknik Transportasi Darat Indonesia - STTD, Kota Bekasi, Indonesia

^{3*} Sarjana Terapan Transportasi Darat, Politeknik Transportasi Darat Indonesia - STTD, Kota Bekasi, Indonesia

^{4*} Sarjana Terapan Transportasi Darat, Politeknik Transportasi Darat Indonesia - STTD, Kota Bekasi, Indonesia

^{1*} anggiputriekthy@gmail.com, ^{2*} nurhanifahhasna.hn@gmail.com,
^{3*} sugandariyan00@gmail.com, ^{4*} caesario.boing@ptdisttd.ac.id

Abstract

A bus stop (halte) is one of the essential supporting facilities for public transportation and plays a critical role in sustaining community mobility, particularly among students, in areas experiencing high mobility pressure such as Karawang Regency, an area widely recognized as a major industrial zone in West Java. One example of such a facility is the SMPN 5 Karawang bus stop, which functions as a primary access point for students, educators, and surrounding residents. This study aims to evaluate the service quality of the SMPN 5 Karawang bus stop by assessing the suitability of its existing physical facilities against the Minimum Service Standard (Standar Pelayanan Minimum/SPM) established under Decree of the Directorate General of Land Transportation Number 271/HK.105/DRJD/96, and to identify which service attributes require priority improvement. A descriptive qualitative and quantitative approach was employed, combining direct field observation, standardized facility inventory forms, systematic photographic documentation, and interviews with users and bus stop managers, complemented by secondary data obtained from relevant regional agencies. Facility fulfillment levels were calculated using a percentage-based compliance formula applied separately to mandatory (primary) and supplementary facility categories. The results indicate that of the ten facility items assessed, only the identity signage was available, albeit in a deteriorated condition, while the protective canopy was present but structurally unfit for use; the remaining eight items, including seating, route information boards, and lighting, were entirely absent. The overall compliance rate reached only 10 percent, with primary facilities at 16.7 percent and supplementary facilities at 0 percent, indicating that the bus stop has not yet met minimum service expectations and requires facility rehabilitation as the top improvement priority. This study is expected to inform local government policy for improving bus stop infrastructure and student transportation safety.

Keywords: Service Quality; Minimum Service Standar (SPM); Facility Compliance; Student Transportation; SMPN 5 Karawang.

Article info

Received 17 Juli 2026

Revised 27 Juli 2026

Accepted 6 Agustus 2026

Available Online 12 Agustus 2026

anggiputriekthy@gmail.com

Copyright©2026. Published by Jurnal Prima Manajemen – Al -Afif

Abstrak

Halte bus merupakan salah satu fasilitas pendukung penting bagi transportasi umum dan memainkan peran penting dalam menjaga mobilitas masyarakat, khususnya di kalangan pelajar, di daerah yang mengalami tekanan mobilitas tinggi seperti Kabupaten Karawang, daerah yang dikenal luas sebagai zona industri utama di Jawa Barat. Salah satu contoh fasilitas tersebut adalah halte bus SMPN 5 Karawang, yang berfungsi sebagai titik akses utama bagi pelajar, pendidik, dan warga sekitar. Studi ini bertujuan untuk mengevaluasi kualitas pelayanan halte bus SMPN 5 Karawang dengan menilai kesesuaian fasilitas fisik yang ada terhadap Standar Pelayanan Minimum (SPM) yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Nomor 271/HK.105/DRJD/96, dan untuk mengidentifikasi atribut pelayanan mana yang memerlukan peningkatan prioritas. Pendekatan kualitatif dan kuantitatif deskriptif digunakan, yang menggabungkan observasi lapangan langsung, formulir inventaris fasilitas standar, dokumentasi fotografi sistematis, dan wawancara dengan pengguna dan pengelola halte bus, dilengkapi dengan data sekunder yang diperoleh dari instansi daerah terkait. Tingkat pemenuhan fasilitas dihitung menggunakan rumus kepatuhan berbasis persentase yang diterapkan secara terpisah pada kategori fasilitas wajib (utama) dan tambahan. Hasilnya menunjukkan bahwa dari sepuluh item fasilitas yang dinilai, hanya papan identitas yang tersedia, meskipun dalam kondisi yang rusak, sedangkan kanopi pelindung ada tetapi secara struktural tidak layak digunakan; delapan item lainnya, termasuk tempat duduk, papan informasi rute, dan penerangan, sama sekali tidak ada. Tingkat kepatuhan keseluruhan hanya mencapai 10 persen, dengan fasilitas utama sebesar 16,7 persen dan fasilitas tambahan sebesar 0 persen, menunjukkan bahwa halte bus belum memenuhi harapan layanan minimum dan membutuhkan rehabilitasi fasilitas sebagai prioritas peningkatan utama. Studi ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada kebijakan pemerintah daerah untuk meningkatkan infrastruktur halte bus dan keselamatan transportasi siswa.

Kata kunci: Kualitas Layanan; Standar Layanan Minimum (SPM); Kepatuhan Fasilitas; Transportasi Siswa; SMPN 5.

1. PENDAHULUAN

Transportasi umum memiliki peran penting dalam mendukung mobilitas masyarakat, termasuk pelajar khususnya di kawasan-kawasan dengan tekanan mobilitas tinggi seperti Kabupaten Karawang yang dikenal sebagai kawasan industri besar. Kebutuhan akan sistem transportasi publik yang terencana dengan baik menuntut ketersediaan infrastruktur pendukung yang layak, salah satunya adalah halte. Sebagai respons atas kebutuhan tersebut, Halte SMPN 5 Karawang dihadirkan di kawasan pendidikan untuk memudahkan akses pelajar, tenaga pendidik, dan warga sekitar. Halte bukan sekadar titik tunggu, melainkan ruang interaksi pertama antara penumpang dan sistem angkutan umum, sehingga kelengkapan fasilitas, kondisi bangunan, serta rasa aman dan nyaman yang ditawarkan akan memengaruhi persepsi masyarakat terhadap layanan transportasi secara keseluruhan.

Kondisi tersebut menuntut adanya pengkajian berkala terhadap kondisi fisik dan tata ruang halte melalui inventarisasi fasilitas eksisting, seperti tempat duduk, papan informasi trayek, pencahayaan, pelindung cuaca, dan fasilitas disabilitas, serta evaluasi kesesuaiannya dengan Standar Pelayanan Minimum (SPM) sebagai tolok ukur keselamatan, kenyamanan, keterjangkauan, dan inklusivitas. Berbagai penelitian pada halte dan perhentian angkutan umum di kota-kota lain menunjukkan pola yang serupa, yaitu tingkat pemenuhan fasilitas terhadap SPM yang masih rendah dan menjadi sumber ketidakpuasan pengguna. Namun demikian, penelitian yang secara spesifik mengevaluasi kesesuaian kondisi eksisting Halte SMPN 5 Karawang dengan SPM masih sangat jarang dilakukan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menilai kondisi fasilitas Halte

SMPN 5 Karawang secara menyeluruh guna mengidentifikasi aspek-aspek yang masih perlu diperbaiki.

Permasalahan minimnya pemenuhan fasilitas halte terhadap SPM sesungguhnya bukan persoalan yang berdiri sendiri, melainkan berkaitan erat dengan pola pengelolaan angkutan umum secara keseluruhan, mulai dari kondisi armada, kepastian jadwal, hingga integrasi antarmoda. Ketika halte sebagai simpul pelayanan pertama tidak dikelola dengan baik, maka citra dan daya tarik transportasi umum secara umum turut menurun, sehingga masyarakat cenderung beralih ke kendaraan pribadi. Hal ini menjadi semakin krusial pada lokasi-lokasi yang berdekatan dengan fasilitas pendidikan, mengingat pelajar merupakan kelompok pengguna yang rentan dan sangat bergantung pada ketersediaan angkutan umum untuk mobilitas hariannya. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi landasan rekomendasi bagi pemerintah daerah dan pihak terkait dalam meningkatkan standar fasilitas halte agar layanan angkutan umum di Kabupaten Karawang semakin nyaman, aman, dan berdampak positif bagi masyarakat luas.

2. KAJIAN TEORI

Halte merupakan fasilitas pendukung pelayanan angkutan umum yang berfungsi sebagai titik naik dan turun penumpang serta tempat menunggu kendaraan. Dalam konteks pelayanan publik, kualitas halte tidak hanya ditentukan oleh keberadaan bangunan, tetapi juga oleh kelengkapan fasilitas, kondisi fisik, keamanan, kenyamanan, aksesibilitas, dan ketersediaan informasi perjalanan. Karena itu, evaluasi kondisi halte perlu dilakukan dengan membandingkan kondisi eksisting dengan standar pelayanan yang ditetapkan.

Standar fasilitas halte dalam penelitian ini mengacu pada Surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor 271/HK.105/DRJD/96. Berdasarkan acuan tersebut, fasilitas halte dikelompokkan menjadi fasilitas utama yang bersifat wajib dan fasilitas tambahan. Fasilitas utama yang dinilai meliputi identitas halte, rambu petunjuk utama, papan informasi trayek utama, lampu penerangan, tempat duduk, dan kanopi atau atap pelindung. Fasilitas tambahan meliputi telepon umum, tempat sampah, pagar pembatas, serta papan iklan atau pengumuman.

Penilaian tingkat pemenuhan dilakukan dengan membandingkan jumlah fasilitas yang tersedia dan layak sesuai standar dengan seluruh fasilitas yang dinilai. Hasil penilaian kemudian digunakan untuk mengidentifikasi tingkat kesesuaian, kekurangan fasilitas, serta kebutuhan perbaikan. Pendekatan tersebut memungkinkan kondisi halte dinilai secara terukur sekaligus memberikan dasar bagi penyusunan rekomendasi peningkatan fasilitas.

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa persoalan kualitas fasilitas halte dan pelayanan angkutan umum masih ditemukan di berbagai wilayah. Wibisono dan Putri mengevaluasi kualitas pelayanan halte, sedangkan Salsaqilah *et al.* mengkaji kenyamanan halte berdasarkan kebutuhan pengguna. Penelitian mengenai kualitas layanan angkutan umum juga menunjukkan pentingnya aksesibilitas, keselamatan, kenyamanan, serta pengelolaan pelayanan. Penelitian ini menempatkan Halte SMPN 5 Karawang sebagai objek kajian dengan fokus pada pemenuhan fasilitas terhadap SPM serta kebutuhan peningkatan fasilitas di kawasan sekolah.

Pada prinsipnya, kajian teori dalam penelitian memuat tiga hal utama. Pertama, uraian mengenai konsep, teori, dalil, hukum, model, dan rumus yang relevan, termasuk penjelasan mengenai bagaimana konsep atau teori tersebut berkembang dan digunakan dalam bidang kajian yang diteliti. Kedua, penyajian hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan topik, meliputi prosedur yang digunakan, subjek yang diteliti, serta temuan yang diperoleh, sehingga dapat menjadi acuan dan pembanding dengan penelitian yang sedang dilakukan. Ketiga, penjelasan mengenai posisi teoretis peneliti, yaitu sudut pandang atau kerangka pemikiran peneliti dalam memahami dan menafsirkan masalah

yang diteliti. Dengan demikian, kajian teori bukan sekadar kumpulan teori, tetapi merupakan dasar konseptual yang menempatkan penelitian pada kerangka ilmiah yang jelas serta memperlihatkan keterkaitannya dengan penelitian-penelitian sebelumnya.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dan kuantitatif. Pendekatan kualitatif digunakan untuk mendeskripsikan kondisi fisik, tata letak, dan permasalahan yang ditemukan di lapangan, sedangkan pendekatan kuantitatif digunakan untuk menghitung persentase tingkat pemenuhan fasilitas terhadap standar. Objek penelitian adalah Halte SMPN 5 Karawang yang berlokasi di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Kelurahan Nagasari, Kecamatan Karawang Barat, Kabupaten Karawang, pada jalan lokal sekunder tipe 4/2 T. Pengambilan data lapangan dilaksanakan pada tahun 2026.

Data sekunder diperoleh dari Dinas Perhubungan Kabupaten Karawang, BAPPEDA Kabupaten Karawang, BPS Kabupaten Karawang, DPUPR Kabupaten Karawang, dan Kementerian Perhubungan. Data primer dikumpulkan melalui survei inventarisasi halte menggunakan formulir terstandar, dokumentasi foto sistematis dari berbagai sudut pandang, serta wawancara kepada pengguna dan pengelola halte.

Analisis data dilakukan melalui lima tahap, yaitu analisis kondisi eksisting untuk mendeskripsikan kondisi aktual halte; analisis kesesuaian fasilitas eksisting dengan SPM menggunakan matriks perbandingan; analisis tingkat kelengkapan fasilitas dengan menghitung persentase pemenuhan; penyusunan desain usulan berdasarkan hasil analisis dan standar teknis yang berlaku; serta kajian dampak keberadaan halte yang layak pakai terhadap keselamatan dan kenyamanan pengguna.

Persentase pemenuhan fasilitas dihitung dengan membandingkan jumlah fasilitas yang tersedia dan sesuai standar dengan total fasilitas yang dinilai, kemudian dikalikan seratus persen. Fasilitas dinyatakan sesuai apabila tersedia dan berada dalam kondisi layak sesuai ketentuan SPM. Hasil perhitungan dilakukan secara terpisah untuk fasilitas utama dan fasilitas tambahan, kemudian dihitung tingkat pemenuhan keseluruhan.

Pada metode penelitian, isi dan penjelasannya disesuaikan dengan pendekatan yang digunakan. Jika penelitian memakai pendekatan kuantitatif, maka metode penelitian memuat desain atau rancangan penelitian, partisipan, populasi dan sampel, instrumen penelitian yang digunakan untuk mengumpulkan data, prosedur penelitian yang menggambarkan langkah-langkah pelaksanaan, serta teknik analisis data yang biasanya dilakukan dengan perhitungan angka atau statistik. Bagian ini membantu menunjukkan proses penelitian secara sistematis dan terukur.

Sementara itu, jika menggunakan pendekatan kualitatif, metode penelitian berisi desain penelitian, partisipan dan tempat penelitian, cara pengumpulan data seperti wawancara, observasi, atau analisis dokumen, serta teknik analisis data yang dilakukan dengan merangkum, mengelompokkan, dan menarik kesimpulan. Pada penelitian kualitatif juga dapat dicantumkan isu etik, misalnya menjaga kerahasiaan identitas partisipan atau meminta persetujuan sebelum penelitian dilakukan. Dengan demikian, metode penelitian selalu menyesuaikan pendekatan yang dipakai agar langkah penelitian dapat dipahami dengan jelas oleh pembaca.

$$Pf = \frac{\text{Jumlah Fasilitas Sesuai Standar}}{\text{Total Fasilitas Dinilai}} \times 100\%$$

Tabel 3.1 Indikator Kualitas Pelayanan Halte

Variabel	Indikator	Satuan
Kualitas Pelayanan Halte	Kesesuaian	%
	Fasilitas Utama	
	Kesesuaian Fasilitas Tambahan	%
	Tingkat Pemenuhan SPM Keseluruhan	%

Sumber: (Diolah dari SK Dirjen Perhubungan Darat No. 271/HK.105/DRJD/96, 2026)

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Kondisi Eksisting Halte SMPN 5 Karawang

Berdasarkan hasil survei inventarisasi, Halte SMPN 5 Karawang memiliki dimensi panjang 6,44 meter, lebar 2,4 meter, dan tinggi 3 meter, dengan struktur konstruksi beton dan besi beratap kanopi. Kondisi fisik halte saat ini telah mengalami penurunan kualitas, ditandai dengan cat yang pudar dan kusam, komponen besi yang berkarat, serta banyaknya coretan pada dinding. Dimensi halte juga tergolong kecil untuk menampung volume pengguna pada jam-jam sibuk, dan belum tersedia jalur difabel maupun papan informasi trayek.

Penurunan kualitas fisik tersebut mengindikasikan belum adanya program pemeliharaan rutin dan berkala terhadap aset infrastruktur halte oleh instansi pengelola. Cat yang pudar dan komponen besi yang berkarat menunjukkan kondisi pemeliharaan yang belum memadai, sementara banyaknya coretan pada dinding mengindikasikan lemahnya pengawasan terhadap aset publik di kawasan tersebut. Dimensi halte yang kecil juga menjadi persoalan tersendiri karena pada jam sibuk, khususnya saat masuk dan pulang sekolah, kapasitas tampung halte berpotensi tidak mencukupi sehingga siswa dapat menunggu di luar area halte. Ketidadaan jalur difabel dan papan informasi trayek turut menegaskan bahwa aspek inklusivitas dan kemudahan akses informasi belum terpenuhi.

4.2 Karakteristik Trayek yang Melintasi Halte

Halte SMPN 5 Karawang terletak tepat di depan SMP Negeri 5 Karawang yang memiliki 1.294 siswa dan sering digunakan untuk naik-turun angkutan umum. Berdasarkan SK Bupati Karawang Nomor 551.21/Kep.510-Huk/2009 tentang Jaringan Trayek Kendaraan Angkutan Penumpang Umum di Wilayah Kabupaten Karawang, terdapat 9 trayek yang memiliki rute melalui Jalan Jenderal Ahmad Yani, namun kondisi di lapangan hanya 4 trayek yang masih beroperasi, yaitu Trayek 01, 07, 17, dan 63. Seluruh trayek dilayani oleh kendaraan jenis Mobil Penumpang Umum merek Carry berkapasitas 10 penumpang dengan status kepemilikan swasta atau perorangan.

Tabel 4.1 Karakteristik Trayek Yang Melintasi Halte

Trayek	Panjang Rute (km)	Jumlah Armada Berizin (unit)	Usia Kendaraan Rata-rata (tahun)	Tarif Umum (Rp)	Tarif Pelajar (Rp)	Jam Operasi (jam/hari)
01	13	42	24	6.000	3.500	16
07	10	100	25	6.000	3.500	10
17	10	100	23	10.000	5.000	14
63	12	40	27	6.000	3.500	15

Sumber: (Hasil Analisis, 2026)

4.3 Standar Fasilitas Halte Berdasarkan SPM

Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor 271/HK.105/DRJD/96, fasilitas halte terbagi menjadi fasilitas utama yang bersifat wajib dan fasilitas tambahan.

Tabel 4.2 Standar Fasilitas Halte Berdasarkan SPM

No.	Jenis Fasilitas	Kategori	Keterangan
1	Identitas Halte (Nama/Nomor)	Utama (Wajib)	Papan nama dengan tulisan jelas dan terbaca
2	Rambu Petunjuk Utama	Utama (Wajib)	Petunjuk arah dan informasi rute
3	Papan Informasi Trayek Utama	Utama (Wajib)	Informasi rute, tujuan, dan jadwal
4	Lampu Penerangan	Utama (Wajib)	Penerangan yang cukup untuk keamanan
5	Tempat Duduk	Utama (Wajib)	Tersedia untuk calon penumpang
6	Kanopi/Atap Pelindung	Utama (Wajib)	Pelindung dari hujan dan sinar matahari
7	Telepon Umum	Tambahan	Disediakan bila diperlukan
8	Tempat Sampah	Tambahan	Mendukung kebersihan lingkungan
9	Pagar Pembatas	Tambahan	Keamanan dan keteraturan penumpang
10	Papan Iklan/Pengumuman	Tambahan	Informasi publik tambahan

Sumber: (SK Dirjen Perhubungan Darat No. 271/HK.105/DRJD/96, 1996)

4.4 Hasil Inventarisasi Fasilitas Halte

Hasil inventarisasi fasilitas Halte SMPN 5 Karawang berdasarkan survei lapangan tahun 2026.

Tabel 4.3 Hasil Inventarisasi Fasilitas Halte

No.	Jenis Fasilitas	Ketersediaan	Kondisi
1	Identitas Halte (Nama/Nomor)	Ada	Terbaca namun rusak
2	Rambu Petunjuk Utama	Tidak Ada	-
3	Papan Informasi Trayek Utama	Tidak Ada	-
4	Lampu Penerangan	Tidak Ada	-
5	Tempat Duduk	Tidak Ada	-
6	Kanopi/Atap Pelindung	Ada	Tidak Layak/Rusak
7	Telepon Umum	Tidak Ada	-
8	Tempat Sampah	Tidak Ada	-
9	Pagar Pembatas	Tidak Ada	-
10	Papan Iklan/Pengumuman	Tidak Ada	-

Sumber: (Hasil Analisis, 2026)

4.5 Analisis Kesesuaian Fasilitas dengan SPM

Analisis kesesuaian dilakukan dengan membandingkan kondisi eksisting terhadap standar SPM. Hasil analisis menunjukkan bahwa sebagian besar fasilitas utama maupun seluruh fasilitas tambahan belum tersedia atau belum berada dalam kondisi layak.

Tabel 4.4 Analisis Kesesuaian Fasilitas dengan SPM

No.	Fasilitas	Kategori	Standar SPM	Kondisi Eksisting	Status	Keterangan
1	Identitas Halte	Utama	Ada, terbaca	Ada, terbaca	Kurang sesuai	Perlu perbaikan
2	Rambu Petunjuk	Utama	Ada	Tidak Ada	Perlu ada	Disarankan ada
3	Papan Info Trayek	Utama	Ada	Tidak Ada	Perlu ada	Disarankan ada
4	Lampu Penerangan	Utama	Ada, berfungsi	Tidak Ada	Perlu ada	Disarankan ada
5	Tempat Duduk	Utama	Ada, layak	Tidak Ada	Perlu ada	Disarankan ada
6	Kanopi/Atap	Utama	Ada, layak	Ada, tidak layak	Kurang sesuai	Perlu perbaikan
7	Telepon Umum	Tambahan	Opsional	Tidak Ada	Perlu ada	Disarankan ada
8	Tempat Sampah	Tambahan	Opsional	Tidak Ada	Perlu ada	Disarankan ada
9	Pagar Pembatas	Tambahan	Opsional	Tidak Ada	Perlu ada	Disarankan ada
10	Papan Iklan	Tambahan	Opsional	Tidak Ada	Perlu ada	Disarankan ada

Sumber: (Hasil Analisis, 2026)

Dari 6 fasilitas utama yang bersifat wajib, hanya identitas halte yang tersedia meski dalam kondisi kurang sesuai, sementara rambu petunjuk, papan informasi trayek, lampu penerangan, dan tempat duduk sama sekali tidak tersedia. Kanopi atau atap pelindung tersedia namun dalam kondisi tidak layak. Seluruh fasilitas tambahan, yaitu telepon umum, tempat sampah, pagar pembatas, dan papan iklan atau pengumuman, juga tidak tersedia. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perbaikan perlu diarahkan tidak hanya pada bangunan fisik, tetapi juga pada fasilitas informasi, keamanan, kenyamanan, dan pendukung pelayanan.

4.6 Penilaian Tingkat Kelengkapan Fasilitas

Berdasarkan analisis kesesuaian, dilakukan penilaian terhadap tingkat pemenuhan fasilitas utama dan tambahan menggunakan persamaan yang telah ditetapkan. Hasil rekapitulasi.

Tabel 4.5 Penilaian Tingkat Kelengkapan Fasilitas

No.	Kategori Fasilitas	Total Item	Kesesuaian SPM	Ketidaksesuaian SPM	Persentase Pemenuhan
1	Fasilitas Utama	6	1	5	16,7%
2	Fasilitas Tambahan	4	-	4	0%
	Total	10	1	9	10%

Sumber: (Hasil Analisis, 2026)

Tingkat pemenuhan fasilitas utama hanya mencapai 16,7% dan fasilitas tambahan 0%, sehingga persentase pemenuhan keseluruhan terhadap SPM hanya sebesar 10%. Kondisi ini menunjukkan bahwa Halte SMPN 5 Karawang belum memenuhi standar pelayanan minimum yang ditetapkan dan memerlukan perhatian serius dari pemerintah dan pengelola, mengingat rendahnya pemenuhan SPM berdampak pada kenyamanan dan minat masyarakat, khususnya pelajar, dalam menggunakan transportasi publik.

4.7 Desain Usulan Halte

Berdasarkan hasil analisis kondisi eksisting dan evaluasi SPM, dirumuskan desain usulan peningkatan fasilitas Halte SMPN 5 Karawang dengan konsep modern menggunakan material tahan lama berupa kombinasi baja, kayu, dan kaca untuk tampilan yang estetik namun tetap fungsional, sekaligus mempertimbangkan kebutuhan aksesibilitas dan keberlanjutan.

Usulan peningkatan fasilitas diarahkan pada rehabilitasi struktur dan kanopi, penyediaan tempat duduk, papan informasi trayek, lampu penerangan, fasilitas kebersihan, pagar pembatas, serta fasilitas aksesibilitas bagi pengguna berkebutuhan khusus. Gambar desain asli dari naskah sumber belum dapat dipindahkan secara otomatis dalam proses pemformatan ini.

4.8 Dampak Halte yang Layak Pakai di Dekat Sekolah

Keberadaan halte yang layak pakai di sekitar lingkungan sekolah bukan sekadar fasilitas pelengkap jalan, melainkan bagian penting dari upaya menciptakan sistem transportasi yang aman bagi anak-anak sebagai pengguna jalan. Siswa yang bergantung pada angkutan umum membutuhkan titik naik dan turun yang jelas agar tidak harus menunggu di bahu jalan atau menyeberang di sembarang titik.

Ketika halte dibangun dengan standar yang layak, dampaknya dapat dirasakan pada beberapa aspek. Dari sisi keselamatan, risiko kecelakaan lalu lintas di sekitar sekolah dapat ditekan karena siswa memiliki titik naik dan turun yang jelas. Dari sisi ketertiban

lalu lintas, kendaraan penjemput maupun angkutan umum tidak lagi berhenti sembarangan di depan gerbang sekolah sehingga potensi gangguan lalu lintas pada jam masuk dan pulang sekolah dapat berkurang. Dari sisi sosial, halte yang nyaman dapat mendorong siswa dan orang tua untuk lebih memilih transportasi umum dibanding kendaraan pribadi. Pembangunan halte yang layak di dekat sekolah juga merupakan wujud pemenuhan hak anak atas rasa aman dalam perjalanan menuju dan dari tempat belajarnya.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan penelitian ini, tingkat kesesuaian fasilitas Halte SMPN 5 Karawang terhadap SPM SK Dirjen No. 271/HK.105/DRJD/96 sangat rendah. Dari 10 fasilitas yang dikaji, hanya 1 fasilitas, yaitu identitas halte, yang tersedia meskipun kondisinya kurang sesuai. Total persentase pemenuhan hanya mencapai 10%. Dari 6 fasilitas utama atau wajib, tingkat kesesuaian hanya 16,7%, sedangkan fasilitas tambahan memiliki tingkat pemenuhan 0%. Kanopi atau atap pelindung tersedia tetapi kondisinya tidak layak. Rekomendasi strategis mencakup renovasi menyeluruh struktur dan fasilitas halte; penambahan papan informasi trayek; pengadaan lampu penerangan LED; pengadaan tempat sampah dan pagar pembatas; peningkatan aksesibilitas difabel melalui ramp, guiding block, dan handrail; serta pelaksanaan program pemeliharaan rutin dan berkala. Pembangunan halte di dekat sekolah perlu ditempatkan sebagai bagian dari peningkatan keselamatan dan kenyamanan pelajar serta peningkatan kualitas layanan transportasi umum di Kabupaten Karawang.

DAFTAR PUSTAKA

- Wibisono, R. E., & Putri, R. F. (2022). Evaluasi Kualitas Pelayanan Halte Terminal Purabaya pada Transportasi Umum Suroboyo Bus. *Ge-STRAM: Jurnal Perencanaan dan Rekayasa Sipil*, 5(2), 72–78. <https://doi.org/10.25139/jprs.v5i2.4636>
- Salsaqilah, A. P., Rahmawati, A. P., & Sudarismani, I. (2023). Kajian Kenyamanan Halte Satria Tangerang Berdasarkan Kebutuhan Pengguna. *Jurnal Vastukara: Jurnal Desain Interior, Budaya, dan Lingkungan Terbangun*, 3(2), 245–252. <https://doi.org/10.59997/vastukara.v3i2.2730>
- Nursasi, H., & Yenita, Y. (2023). Pengaruh Kualitas Layanan Angkutan Umum Transjakarta terhadap Persepsi Penumpang terkait Aksesibilitas dan Keselamatan Perjalanan (Rute Cibubur-BKN). *Warta Penelitian Perhubungan*, 35(1).
- Rachmadyaningrum, R., Hariani, D., & Herawati, A. R. (2022). Analisis Kualitas Pelayanan Jasa Transjakarta pada Masa Pandemi. *Journal of Public Policy and Management Review*, 11(2).
- Kurniati, N. L. W. R. (2021). Dampak Ekonomi Pengoperasian Transjakarta Ditinjau dari Persepsi Pengguna. *Jurnal Penelitian Transportasi Darat*, 22(2).
- Forino, B. D., & Putranto, L. S. (2023). Persepsi Pengguna Transportasi Umum di Jabodetabek terhadap Integrasi Tarif PT JakLingko Indonesia. *JMTS: Jurnal Mitra Teknik Sipil*, 5(1), 71–84.
- Saleh, Y., Meutia, W., & Anggraini, K. (2024). Evaluasi Kinerja Operasional Angkutan Kota Mikrotrans Jak Lingko. *Jurnal ARTESIS*, 4(1), 34–39.
- Setiawan, Y. (2023). Evaluasi Fasilitas Penyeberangan Jalan di Ruas Jalan Jenderal Sudirman Sokaraja Kabupaten Banyumas. *Jurnal ISMETEK*, 15(1), 18.
- Utama, R. I., & Momon, M. (2021). Evaluasi Kinerja Angkutan Umum Kabupaten Agam. *Cived*, 8(3).
- Priyono, A., & Pradoto, W. (2021). Analisis Faktor-Faktor Pengembangan Kualitas Keamanan dan Kenyamanan Trotoar di Kota Purwodadi (Studi Kasus: Koridor Jalan R. Suprpto). *Jurnal Pembangunan Wilayah dan Kota*, 17(4), 360–371. <https://doi.org/10.14710/pwk.v17i4.35234>

- Ikhsan, A. M., Soesanto, E., & Septian, B. (2024). Implementasi Standar Transportasi dalam Pelayanan Angkutan Umum di Trans Jakarta yang Berbasis kepada UUD 1945. *Jurnal Ilmiah Sains dan Teknologi*, 6, 244–253.
- Dio, N. S. S., Simangunsong, J. E., & Haryanto, B. (2022). Evaluasi Kinerja Operasional pada Trayek B Kota Samarinda. *Jurnal Teknologi Sipil*.
- Nabila, E. F. D., & Putro, H. (2025). Evaluasi Kinerja Pelayanan Trans Jateng Koridor VI Semarang-Grobogan. *Techno*, 26(2), 117–126. <https://doi.org/10.30595/techno.v26i2.26092>
- Purnomo, M. T., & Herijanto, W. (2021). Evaluasi Kinerja Bus Rapid Transit (BRT) Trans Jateng Rute Semarang-Kendal. *Jurnal Teknik ITS*, 10(2). <https://doi.org/10.12962/j23373539.v10i2.63585>
- Laila, N. I., Martini, R., & Astuti, P. (2023). Analisis Kinerja Pelayanan BRT Kota Semarang Melalui Standar Pelayanan Minimal Tahun 2023. *Journal of Politic and Government Studies*, 13(3), 47–61.
- Hidayat, D. W., Oktopianto, Y., Ahmad, R., & Anindita, R. Y. (2022). Evaluasi Kinerja dan Jumlah Armada Angkutan Umum pada Terminal Ubung Denpasar Utara Studi Kasus Trayek Terminal Ubung-Matahari Terbit. *Jurnal Keselamatan Transportasi Jalan (Indonesian Journal of Road Safety)*, 9(2), 131–141. <https://doi.org/10.46447/ktj.v9i2.447>
- Direktorat Jenderal Perhubungan Darat. (1996). Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor 271/HK.105/DRJD/96 tentang Pedoman Teknis Perekayasaan Tempat Perhentian Kendaraan Penumpang Umum. Jakarta: Departemen Perhubungan.
- Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. (2012). Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 10 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Massal Berbasis Jalan. Jakarta: Kementerian Perhubungan.
- Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. (2015). Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 27 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 10 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Massal Berbasis Jalan. Jakarta: Kementerian Perhubungan.
- Pemerintah Kabupaten Karawang. (2009). Keputusan Bupati Karawang Nomor 551.21/Kep.510-Huk/2009 tentang Jaringan Trayek Kendaraan Angkutan Penumpang Umum di Wilayah Kabupaten Karawang. Karawang: Pemerintah Kabupaten Karawang.